



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN BUKIT SUNDI**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025**

**Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

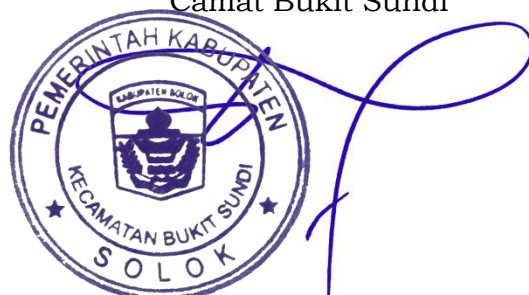
Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

Materi LkjIp mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Muaro paneh, Februari 2026
Camat Bukit Sundi



VICE FEBRIANELDI, S.STP, M.Si

NIP. 19870208 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT SUNDI.....	3
1.4.1. Keadaan Geografis	3
1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Bukit Sundi	5
1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Bukit Sundi	7
1.4.5. Isu – Isu Strategis Organisasi.....	8
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. TUJUAN DAN SASARAN	11
2.1.1. Tujuan.....	13
2.1.2. Sasaran	14
2.2. STRATEGI	14
2.3. SASARAN DAN PROGRAM.....	15
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	16
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	17
2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 TINJAUAN UMUM	49
4.2 TINJAUAN KHUSUS	49
4.3 SARAN TINDAK LANJUT	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari di Lingkup Kecamatan Bukit Sundi Kab Solok.....	4
Tabel 1.2 Jumlah ASN Kecamatan Bukit Sundi berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	7
Tabel 1.3 SDM Kantor Camat Bukit Sundi Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai.....	7
Tabel 1.4 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Sundi.....	8
Tabel 2.1 Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah	11
Tabel 2.2 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran.....	14
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	15
Tabel 2.4 Sasaran dan Program.....	15
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Kecamatan Bukit Sundi	15
Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bukit Sundi 2025.....	18
Tabel 2.8 Penetapan Kinerja Kecamatan Bukit Sundi 2025	18
Tabel 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	21
Tabel 3.2 Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.....	22
Tabel 3.3 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	22
Tabel 3.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	27
Tabel 3.5 Perbandingan Nilai SAKIP	28
Tabel 3.6 Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal	32
Tabel 3.7 Perbandingan Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal dengan Kecamatan Lainnya.....	33
Tabel 3.8 Cakupan Penanggulangan Bencana	37
Tabel 3.9 Perbandingan Cakupan Penanggulangan Bencana dengan Kecamatan Lainnya Di Kabupaten Solok	38
Tabel 3.10 Perbandingan Persentase tingkat penyerapan anggaran Perbandingan Tingkat Serapan Anggaran.....	41
Tabel 3.11 Jumlah Inovasi Kecamatan.....	45
Tabel 3.12 Perbandingan Jumlah Inovasi Kecamatan.....	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan yaitu menjalankan kewenangan pemerintah dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan dalam rangka pembinaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang didukung oleh 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan pada awal tahun 2025, yang kemudian dilakukan perubahan penetapan kinerja menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang didukung oleh 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub-Kegiatan dengan realisasi kinerja 100%/tercapai.

Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dalam tahun anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 1.599.374.634,-** yang terealisasi sebesar **Rp.1.209.629.700,-** atau jika dipresentasikan mencapai tingkat realisasi **75,63%.**

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Sundi dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan negara diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam sistem ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bukit Sundi Tahun 2025 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governemence*, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT SUNDI

1.4.1. Keadaan Geografis

A. Keadaan Geografis Kecamatan Bukit Sundi

Kecamatan Bukit Sundi merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.31 Tahun 2004 dan yang terakhir Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Kecamatan.

Kecamatan Bukit Sundi mempunyai luas wilayah 10.900 Ha (Keputusan Bupati Solok Nomor 100-592-2012), dilihat dari geografisnya berada di wilayah bagian timur Kabupaten Solok, dengan batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut :

- a) Sebelah Timur : Kec. Payung sekaki
- b) Sebelah Selatan : Kec. Lembang jaya
- c) Sebelah Barat : Kec. Kubung
- d) Sebelah utara : Kec. Kubung

Keadaan topografi Kecamatan Bukit Sundi sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian 490 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata per tahun mencapai ± 723 mm, suhu udara rata-rata berkisar antara $15 - 31^{\circ}\text{C}$. Sedangkan dilihat dari penggunaan tanah pertanian/tanah darat, sebagian wilayah merupakan lahan Sawah yang mencapai 3.068 ha, selanjutnya penggunaan lahan terluas ke-2 yaitu Tegal/Kebun seluas 2.919ha, lainnya yaitu Hutan rakyat seluas 2.124 Ha, Bangunan dan Halaman sekitar 1.558 Ha, Perkebunan 710 Ha, Lahan kering lainnya 229 Ha, Ladang/Huma 144 Ha, Padang rumput 46 Ha, Kolam/empang 42 Ha. Kondisi geografis Kec. Bukit Sundi yang terdapat 3 (Tiga) buah sungai mengakibatkan sering terjadinya banjir jika memasuki musim penghujan. Kondisi Jumlah Penduduk yang Semakin Tinggi dan Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Berpotensi sebagai Penyebab Bertambahnya Tingkat Kemiskinan.

Secara administratif Kecamatan Bukit Sundi terbagi ke dalam 5 (lima) n a g a r i yaitu Nagari Muara Panas, Kinari, Parambahan, Bukit Tandang dan Dilam. Sebagian penduduk Kecamatan Bukit Sundi tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini memungkinan rendahnya daya saing masyarakat Kecamatan Bukit Sundi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan pun bertambah.

B. Keadaan Demokrafis Kecamatan Bukit Sundi

Penduduk Kacamatan Bukit Sundi berjumlah 27.680 jiwa yang terdiri dari 13.760 Jiwa Laki-laki dan 13.910 Jiwa Perempuan, mayoritas penduduk hidupnya sebagai petani sebagian kecil pedagang, pengusaha dan Pegawai Negeri.

Tabel 1.1
Daftar Nagari, Jorong dan Pusat Pemerintahan Nagari
di Lingkup Kecamatan Bukit Sundi Kab Solok

No	Nagari	Nama Jorong	Pusat Pemerintahan
1	Muaro Paneh	1. Balai Pinang 2. Galagah 3. Koto Kaciak 4. Koto Panjang 5. Sawah Ampang	Koto Kaciak
2	Kinari	1. Galanggang Tinggi 2. Bungo Harum 3. Pamujan 4. Tapi Aia	Pamujan
3	Parambahan	1. Balai 2. Bawah Mesjid 3. Suduik	Bawah Mesjid
4	Dilam	1. Batu Karak 2. Batu Sangka 3. Kapalo Koto 4. Batu Kijang 5. Balai	Batu Sangka
5	Bukik Tandang	1. Kampung Parik 2. Kampung Tengah 3. Sawah Kandih	Kampung Tengah

1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bab III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-2016 tentang Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang meliputi :

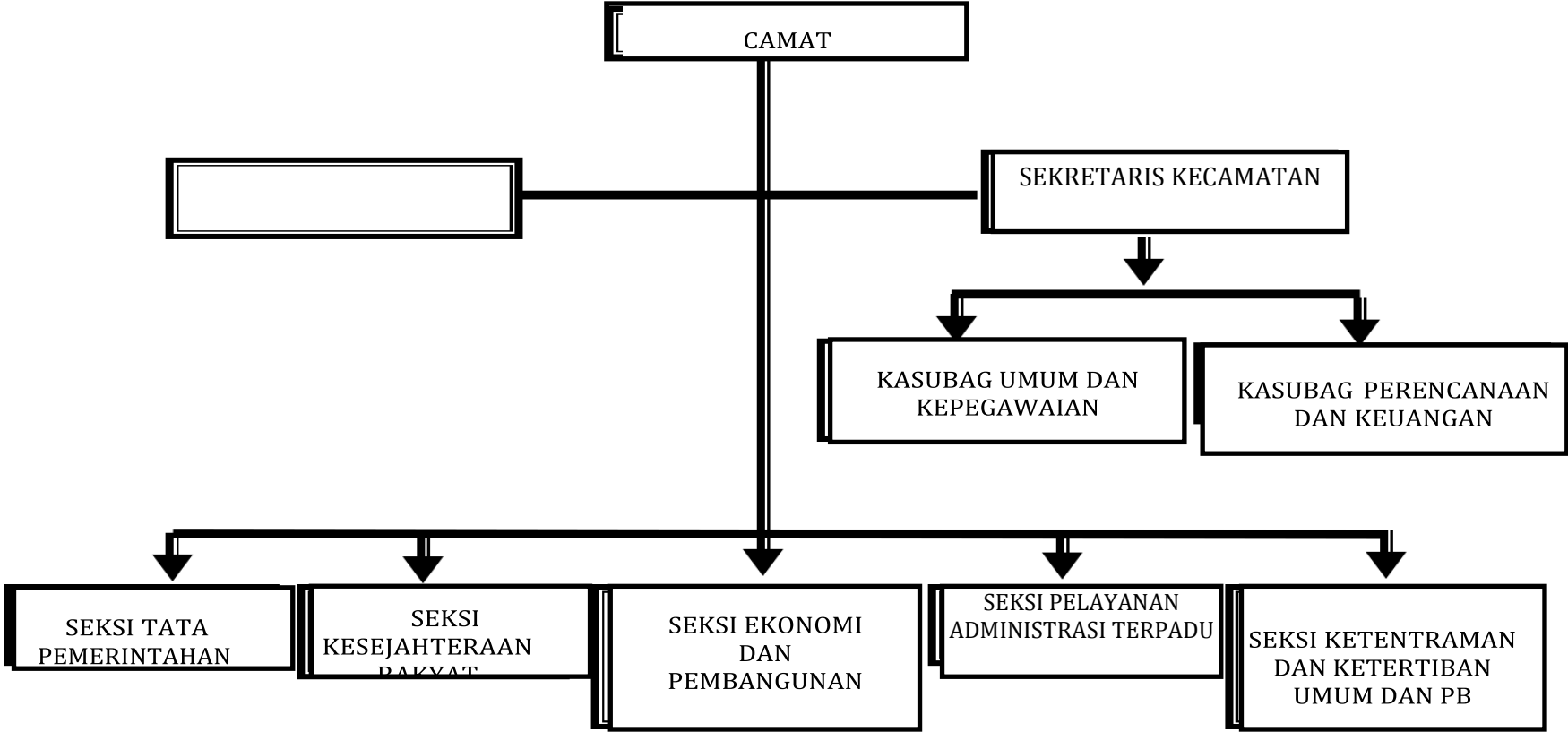
1. Kewenangan Perizinan.
2. Kewenangan Rekomendasi.
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan.
5. Kewenangan Fasilitasi.
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Bukit Sundi

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Bukit Sundi dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1. 1
Struktur OPD Kecamatan Bukit Sundi Perbup Nomor
54 Tahun 2016



1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Bukit Sundi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi , Kantor Camat Bukit Sundi memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Camat Bukit Sundi adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Bukit Sundi Pangkat/ Golongan Ruang

No	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SM A	D3	S1	S2	
I.	Penata Muda (III.a)			1		1
	Penata Muda Tingkat I (III.b)	1		1		2
	Penata (III.c)			1		1
	Penata Tk I (III.d)			1		1
II.	Pembina (IV.a)				1	1
	Pembina Tk I (IV.b)				1	1
	Pembina Utama Muda (IV.c)					
	JUMLAH	1		4	2	7

Sumber Data : Bezzeting Pegawai Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025

Tabel 1. 3
SDM Kantor Camat Bukit Sundi
Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai

No	Uraian Jabatan	Jumla h
1	ESELON III	2
2.	ESELON IV.A	2
3.	ESELON IV.B	1
4.	STAFF	2
5	PPPK Paruh Waktu	2
6	Outsourcing	2
	JUMLAH	11

1.4.5. Isu – Isu Strategis Organisasi

Isu strategis Kecamatan Bukit Sundi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan 37 selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Bukit Sundi, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu- isu strategis. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Bukit Sundi tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tabel 1.4

Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Sundi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KECAMATAN Memiliki Kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan kulaitas pelayanan publik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Kemajuan teknologi, Ketertinggalan Kecanggihan Teknologi.	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	* belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah kebawah *belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan	Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas

Sumber : Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025

Adapun Isu strategis yang diangkat untuk renstra Kecamatan Bukit Sundi yaitu “ ***Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas***”

Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas juga berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP mencakup evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Kecamatan Bukit Sundi. Peningkatan tata kelola yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat yang proaktif dan kolaboratif.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal yang berbasis digitalisasi maka perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Bukit Sundi yang menjalankan fungsi pelayanan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam/ isu- isu strategis (strategicissued) yang sedang dihadapi oganisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kineja
2. Piagam Penghargaan
3. Lain- lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Kecamatan Merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Solok. Karena itu Program kegiatan di Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 adalah :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah

Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA	• Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani. • “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. • “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi.

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Bukit Sundi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

2.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bukit Sundi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Bukit Sundi adalah sebagai berikut ;

Tabel 2. 2 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

VISI “TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”			
MISI MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DAN BERINTEGRITAS DALAM MELAYANI			
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Meningkatkan kualitas pelayanan pada Masyarakat - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik. - Nilai Akuntabilitas Kinerja - Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks) - Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.2. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di paparkan selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel ;

Tabel 2. 3
Strategi dan Arah Kebijakan

N o	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	- Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan berbasis digitalisasi; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah kecamatan	- Meningkatkan management ASN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah - Meningkatkan koordinasi lintas sectoral secara komprehensif - Memafaatkan akses teknologi informasi dan digiltalisasi

2.3. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4
Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 2. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Bukit Sundi dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai yang menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik yang diberikan dikecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan indikator unsur-unsur pelayanan	$IKM = \frac{\text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 25$ dimana: Nilai Unsur : skor rata-rata dari survei responden terhadap setiap unsur pelayanan (skala 1–4) Jumlah Unsur = banyaknya unsur yang diukur (umumnya 9 unsur sesuai pedoman) Faktor pengali 25 digunakan untuk mengubah skala 1–4 menjadi skala 25–100.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai pedoman KemenPAN-RB, yang dinilai melalui evaluasi resmi.	$\text{Nilai Sakip PD} = \frac{\text{Skor hasil evaluasi oleh Evaluator resmi}}{25} \times \text{Skor Maksimal}$

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Adapun Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Bukit Sundi 2025 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6
PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025 KECAMATAN BUKIT SUNDI

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
SASARAN PERJANJIAN KENERJA			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,01
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB

Perjanjian kinerja Kecamatan Bukit Sundi pada tahun 2025 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati pada Januari 2025, kemudian dilakukan revisi anggaran pada bulan Mei dan perubahan anggaran pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada Januari 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok sudah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
2. Adanya revisi penyesuaian alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.
3. Adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.7
PERUBAHAN PERJANJIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN
BUKIT SUNDI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
		IKU	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,60
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,11

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 ini.

2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2. 8
Penetapan Kinerja Kecamatan Bukit Sundi 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	
					Awal	Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,60 Indeks	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	217.668.348	95.552.850
		Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100%	1. PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.872.940	6.743.646
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	189.795.408,	88.809.204
		Cakupan Penanggulang an Bencana	100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dengan kegiatan :	6.900.000	4.350.000

				1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.900.000	4.350.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :	1.594.137.594	1.499.471.784
				1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.731.878	46.731.878
				2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.260.936.575	1.158.684.505
				3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.882.922	2.882.922
		Persentase penyerapan anggaran		4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.660.000	34.716.418
				5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.892.575,	22.133.296
				6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.172.277	17.013.240
			95%	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.846.000	51.734.000
				8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.750	112.750
				9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.233.132	17.233.154
				10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.206.000	119.766.136
				11. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banunan Lainnya	28.463.485	28.463.485
Jumlah					1.818.705.942	1.599.374.634

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan merupakan indikator dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
- 2) Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- 3) Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
- 4) Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup unsur :

No	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Prilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Formulasi penentuan nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji diatas, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk data survei pada tahun periode pengujian tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat maka didapat nilai SKM.

Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 yaitu 3,57 dengan jumlah nilai **89,14** dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Bukit Sundi adalah sangat memuaskan Masyarakat pengguna layanan. Jadi secara umum Kecamatan Bukit Sundi telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 Sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,57	100

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 3,60 dan terealisasi sebesar 3,57 dengan capaian 100%.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RENSTRA

Tabel 3.2
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Target dan capaian indeks kepuasan Masyarakat beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	IKU	Realisasi (Indeks)					Capaian (%)					Tahun 2030 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,55	3,56	3,56	3,57	103	103	101	100	101	3,81	95,8%

Berdasarkan table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan Masyarakat tahun ini mengalami **peningkatan** jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 dengan indeks 3,81 maka capaian kinerja adalah 95,8 %.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,42	3,57	3,57

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan Bukit Sundi sama dari rata- rata IKM Tingkat Kabupaten Solok pada Tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan IKM Provinsi Sumatera Barat nilai IKM secara penilaian sama-sama berkategori *Sangat Baik*.

Perbandingan nilai IKM Kecamatan Bukit Sundi dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	X Koto Singkarak	3,92
2	Lembang Jaya	3,69
3	Sungai Lasi	3,65
4	Kubung	3,62
5	Junjung Sirih	3,61
6	Payung Sekaki	3,60
7	X Koto Diatas	3,60
8	Danau Kembar	3,60
9	Gunung Talang	3,60
10	Lembah Gumanti	3,59
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Bukit Sundi	3,57
13	Tigo Lurah	3,57
14	Pantai Cermin	3,58

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan publik pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok berada pada peringkat dua belas dan dikategorikan *Sangat Baik* .

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBABKEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya IKM sebagai berikut :

- 1. Faktor Pendukung
 - a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
 - b. Adanya kotak pengaduan yang diletakkan dekat ruang pelayanan yang memudahkan Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran;
 - c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat;
 - d. Pelayanan didukung oleh SDM yang telah dibekali sesuai SOP pelayanan public
 - e. Adanya komitmen dan maklumat pimpinan beserta seluruh aparatur untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan
 - f. Pelaksanaan brifing kepada petugas PATEN secara berkala terkait pelayanan kepada masyarakat

2. Faktor Penghambat
 1. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga Masyarakat masih datang langsung berurusan untuk mendapat layanan. Hal tersebut akibat belum tersedianya aplikasi berbasis layanan secara digital
 2. Adanya kekosongan jabatan penanggungjawab kasi pemerintahan sehingga kegiatan masih dihandle oleh staf PNS
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 1. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik
 2. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat
 3. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
 4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat
 5. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efektiitas pelaksanaan kegiatan

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Targe t	Realisas i	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,57	100 %	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	95.552.850	61.101.340	63.95%
				Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.350.000	4.350.000	100%
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	99.902.850	65.451.340	65.51 %
Tingkat efisiensi = 34,49 %							
Tingkat Efektivitas = 152,65 %							

Pada indikator indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bukit Sundi Tingkat efisiensinya sebesar 34,49 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 152,65 % dengan Pagu Anggaran Rp. 99.902.850,- . Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan Masyarakat Dalam pemberian penilaian terhadap kinerja kecamatan serta keikutsertaan dalam Pembangunan
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan dokumentasi sebagai berikut sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Rapat Staf dalam melakukan evaluasi layanan



2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini adalah terkait dengan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang menampung usulan Pembangunan Masyarakat untuk diteruskan ke Tingkat Kabupaten .



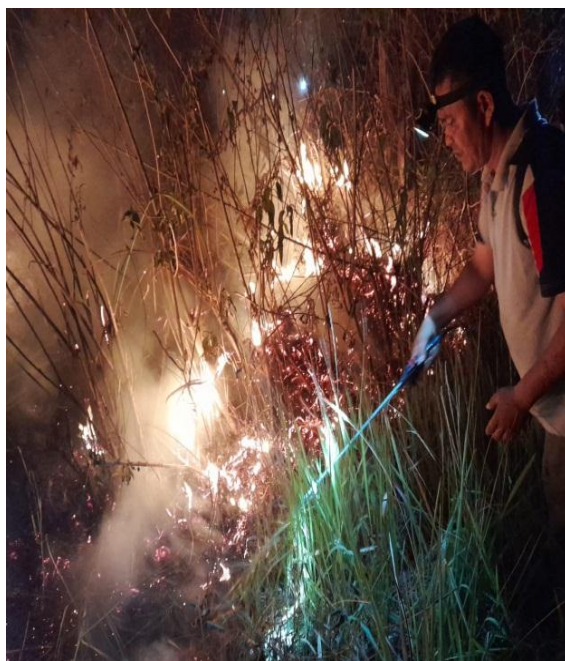
Dokumentasi kegiatan Musrenbang



Dokumentasi pelayanan kepada Masyarakat saat pengisian kuesioner

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan.



Dokumentasi Kegiatan Penanganan Bencana Bersama TNI dan Polri dalam pencapaian cakupan penanggulangan bencana

Adapun dalam Upaya pencapaian Nilai IKM didukung oleh dukungan anggaran dengan program kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	95.552.850	61.101.340	63.95%
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan :	95.552.850	61.101.340	63.95%
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	6.743.646	4.418.000	65.51%
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.809.204	56.683.340	63.83%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	4.350.000	4.350.000	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan:	4.350.000	4.350.000	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.350.000	4.350.000	100%

II. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sintem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.4
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Akuntanbilitas Kinerja	B	-	0

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntablitas Kinerja lingkup layanan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 tidak terealisasi karena untuk Kecamatan tidak ada penilaian.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2030 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	-	-	-	B	B	-	-	-	BB	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Kecamatan mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 tidak ada penialain oleh Inspektoirat Daerah.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada table 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Nilai SAKIP

No	Indikator Kinerja	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,85	68,74	*68,86

Keterangan : Nilai SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat tergambar bahwa Nilai SAKIP Kecamatan Bukit Sundi pada terakhir dinilai pada Tahun 2022 memiliki nilai 68,86 dengan nilai B. Untuk nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2025, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2022.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

- 1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menerapkan SAKIP secara konsisten
 - b. Arahan pimpinan dalam memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja
 - c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala dalam memastikan capaian kinerja
 - d. Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja
- 2. Faktor Penghambat
 - a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
 - b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
 - c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur
- 3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
 - b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
 - c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
 - d. Optimisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.499.471.784	1.144.178.360	76,31
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	1.499.471.784	1.144.178.360	76,31
Tingkat efisiensi = 23,69%							
Tingkat Efektivitas = 131,04%							

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Bukit Sundi Tingkat efisiensinya sebesar 23,69 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 131,04 % dengan Pagu Anggaran Rp. 1.499.471.784. Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- 2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan
- 3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian kinerja aparatur.



Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran pada program kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.552.850	61.101.340	63.95%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.552.850	61.101.340	63.95%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.743.646	4.418.000	65.51%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.809.204	56.683.340	63.83%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.350.000	4.350.000	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.350.000	4.350.000	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.350.000	4.350.000	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.471.784	1.144.178.360	76,31%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.731.878	43.456.136	92.99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.731.878	43.456.136	92.99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.158.684.505	872.188.158	75.27%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.684.505	872.188.158	75.27%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,479,876	89,588,333	69.73%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,882,922	1,337,328	46.39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.133.296	9.986.030	45.12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.716.418	27.171.600	78,27%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.013.240	2.969.375	17.45%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.734.000	48.124.000	93.02%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.345.904	13.997.800	80.70%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.750	0,00	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.233.154	13.997.800	81.23%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.229.621	124.947.933	84.29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.766.136	100.512.791	83.92%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.463.485	24.435.142	85.85%

III. Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal

Indikator cakupan nagari yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal adalah merupakan persentase nagari yang melaksanakan mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa secara optimal. Siskeudes adalah aplikasi keuangan desa yang membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. Tujuan pelaksanaan Siskeudes adalah untuk mewujudkan keuangan desa secara transparan dan akuntabel yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Formulasi untuk menentukan cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal adalah :

Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal

= Jumlah Nagari yang Mengimplementasikan Siskeudes secara Optimal

Jumlah Nagari di Kecamatan Bukit Sundi

x 100%

Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025

No	Nama Nagari	Perencanaan		Penganggaran		Penatausahaan		Pelaporan		Ket
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
1	Muaro Paneh	✓		✓		✓		✓		100%
2	Kinari	✓		✓		✓		✓		100%
3	Parambahan	✓		✓		✓		✓		100%
4	Dilam	✓		✓		✓		✓		100%
5	Bukit Tandang	✓		✓		✓		✓		100%

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.6
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 3.6 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal lingkup layanan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 100 % dan terealisasi sama sebesar 100 % yaitu terealisasi sesuai dengan kondisi yang ditargetkan. Capaian kinerjanya juga adalah 100%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi (%)					Capaian (%)					Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal tahun ini mencapai realisasi sama dengan target dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga mengalami **realisasi yang sama** Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan target 100 % maka capaian kinerja adalah 100 %.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal dengan Kecamatan Lainnya

No	Kecamatan	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Secara Optimal
1	Kubung	100 %
2	Bukit Sundi	100 %
3	Junjung Sirih	100 %
4	Payung Sekaki	100 %
5	X Koto Diatas	100 %
6	Lembang Jaya	100 %
7	X Koto Singkarak	100 %
8	Tigo Lurah	100 %
9	Lembah Gumanti	100 %
10	Pantai Cermin	100 %
11	Hiliran Gumanti	100 %
12	Danau Kembar	100 %
13	Gunung Talang	100 %
14	Sungai lasi	100%

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat tergambar bahwa Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Bukit Sundi telah diaplikasikan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Solok dengan capaian adalah 100 %.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes secara optimal sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendukung
 - a. Telah tersedia regulasi dan SOP pendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes
 - b. Tersedianya jaringan yang memadai dalam menginput data kedalam aplikasi Siskeudes
 - c. Tersedianya operator dalam menginput data pada Siskeudes
 - d. Adanya peran pendamping desa mau pun Kecamatan dalam mengawal implementasi Siskeudes
 - e. Adanya peran Lembaga dan Masyarakat dalam pengawasan impelmentasi Siskeudes
 - f. Ada nya koordinasi yang komprehensif antara Kecamatan dengan DPMN dalam implementasi Siskeudes
 - g. Pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi siskeudes oleh Kecamatan secara periodik
- 2) Faktor Penghambat
 - a. Pemahaman SDM Pemerintah Nagari dinilai masih belum optimal dalam meningkatkan penatusahaan keuangan secara akuntabel melalui aplikasi Siskeudes
 - b. Pelakasnaan pemantauan optimalisasi penatusahaan keuangan berbasis siskeudes masih dilakukan secara manual atau tatap muka langsung
 - c. Adanya kekosongan jabatan penanggungjawab kasi pemerintahan sehingga kegiatan masih dihandle oleh staf PNS
- 3) Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Peningkatan kapasitas nagari oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan dan administrasi nagari
 - b. Optimalisasi pelaksanaan monev pelaksanaan APB nagari secara efektif dan efisien
 - c. Optimalisasi aparatur dalam pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan peneglolaan keuangan nagari
 - d. Optimalisasi peran pendamping desa dan pendamping local desa dalam pembinaan pelaksanaan perencanaan sampai dengan pelaporan Pembangunan nagari

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes	100%	100 %	100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.552.850	61.101.340	63,95
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	95.552.850	61.101.340	63,95
Tingkat efisiensi = 36,05%							
Tingkat Efektivitas = 156,37							

Pada indikator Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Bukit Sundi Tingkat efisiensinya sebesar 36,05 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 156,37 % dengan Pagu Anggaran Rp. 95.552.850,- . Dalam pencapaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
- b. Optimalisasi Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari
- c. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes secara optimal terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dengan kegiatan :	95.552.850	61.101.340	63.95%
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub-kegiatan :	95.552.850	61.101.340	63.95%
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	6.743.646	4.418.000	65.51%
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.809.204	56.683.340	63.83%

✓ Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



Dokumentasi Kegiatan money pelaksanaan APB Nagari Kinari



Dokumentasi Kegiatan money Jalan Usaha Tani dan Irigasi Nagari Bukik Tandang

IV. Cakupan Penanggulangan Bencana

Cakupan penanggulangan bencana adalah indikator yang menunjukan kinerja penanggulangan bencana pada Kecamatan Bukit Sundi selama satu tahun. Penanggulangan bencana yang dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi dan penanganan dini terkait bencana alam yang terjadi di Nagari. Bukit Sundi merupakan daerah rawan bencana yang rentan terjadi bencana alam terutama banjir, longsor dan Kebakaran. Formulasi penentuan cakupan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Penanggulangan Bencana} = \frac{\text{Jumlah bencana yang Tindak Lanjuti} \times 100}{\text{Jumlah Bencana yang terjadi}} \%$$

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.8
Cakupan Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 3.8 diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Penanggulangan Bencana lingkup layanan Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 100 % dan terealisasi sebesar 100 % Dimana target dan capaian terealisasi sama. Capaian kinerja sesuai dengan target dengan capaian 100 %.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Cakupan Penanggulangan Bencana beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Penanggulangan Bencana tahun ini target nya tercapai tahun ini Dimana target sama dengan dengan realisasi dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga sama capainnya antara target dan realisasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah juga sama dengan target yaitu 100 %

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.9 berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Cakupan Penanggulangan Bencana dengan Kecamatan Lainnya Di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Cakupan Penanggualangan Bencana
1	Kubung	100 %
2	Bukit Sundi	100 %
3	Junjung Sirih	100 %
4	Payung Sekaki	100 %
5	X Koto Diatas	100 %
6	Lembang Jaya	100 %
7	X Koto Singkarak	100 %
8	Tigo Lurah	100 %
9	Lembah Gumanti	100 %
10	Pantai Cermin	100 %
11	Hiliran Gumanti	100 %
12	Danau Kembar	100 %
13	Gunung Talang	100 %
14	Sungai lasi	100%

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat tergambar bahwa Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Bukit Sundi capaiannya sama dengan Kecamatan Danau Kembar yaitu sama-sama tercapai 100 %.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Cakupan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

- Faktor Pendukung
 - a. Pelaporan kejadian bencana dilaporkan secara cepat Pemerintah Nagari (Responsif)
 - b. Partisipasi aktif Masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - c. Kemudahan pelaporan bencana via telp dan Wa
 - d. Sinergitas antara POLRI dan TNI dalam respon dan penanggulangan bencana cukup baik
 - e. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - f. Tersedianya Satlinmas Nagari yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana secara dini
 - g. Hubungan yang baik antara pemerintah Kabupaten dan Tingkat kecamatan

- Faktor Penghambat
 - a) Keterbatasan peralatan pendukung dalam penanganan bencana alam
 - b) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berada di pelerengan
- Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a) Pembinaan satlinmas nagari secara periodik dalam menjalankan tugasnya untuk membantu penanggulangan bencana serta minimalisasi gangguan trantibum
 - b) Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk melakukan swadaya dalam penanganan bencana alam
 - c) Penyampaian proposal untuk penyediaan peralatan pendukung penanganan bencana alam di Nagari
 - d) Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait mitigasi bencana oleh stakeholder terkait

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Targ et	Realisa si	Capaian		Pagu (Rp)	Realisa si	%
Cakupan Penanggul angan Bencana	100	100 %	100 %	Program Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Umum	4.350.000	4.350.000	100
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran	4.350.000	4.350.000	100
Tingkat efisiensi = - %							
Tingkat Efektivitas = 100 %							

Pada indikator Cakupan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Bukit Sundi Tingkat efisiensinya sebesar - % dan Tingkat efektivitasnya adalah 100 % dengan Pagu Anggaran Rp. 4.350.000,-. Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan Masyarakat Dalam penanganan bencana
3. Optimalisasi SDM aparatur baik ASN maupun PPPK Paruh Waktu dalam mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI,TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan.



Dokumentasi Kegiatan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Bersama TNI dan Polri

Dukungan anggaran dalam pencapaian cakupan penanggulangan bencana :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan:	4.350.000	4.350.000	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan:	4.350.000	4.350.000	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.350.000	4.350.000	100

V. Persentase Tingkat penyerapan anggaran

Persentase tingkat penyerapan anggaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang telah diserap dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total anggaran yang ada. Formulai pengukuran indikator nya adalah :

Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran = $\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Terealisasi}}{\text{Total Anggaran Dalam Satu tahun}} \times 100 \%$

Persentase tingkat penyerapan anggaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	95 %	75,63 %	76,84 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Tingkat Serapan Anggaran Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 **tidak tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 95 % dan terealisasi sebesar 75,63 % Dimana terdapat penurunan sebesar 19,37 %. Capaian kinerja nya adalah 76,84 %.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran	96,2	89,84	97,18	86,87	75,63	101,3	94,56	102,3	91,44	76,84	95	95,73%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase tingkat penyerapan anggaran tahun mengalami **penurunan** jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini yang mengalami **penurunan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah 95,73%.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Persentase tingkat penyerapan anggaran
Perbandingan Tingkat Serapan Anggaran

No	Kecamatan	Persentase Tingkat Serapan Anggaran
1	Kubung	87,15
2	Bukit Sundi	75,63
3	Junjung Sirih	92,96
4	Payung Sekaki	85,79
5	X Koto Diatas	91,56
6	Lembang Jaya	82,39
7	X Koto Singkarak	79,41
8	Tigo Lurah	90,66
9	Lembah Gumanti	91,26
10	Pantai Cermin	84,35
11	Hiliran Gumanti	84,35
12	Danau Kembar	85,22
13	Gunung Talang	88,49
14	Sungai lasi	84,07

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat tergambar bahwa Persentase tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Bukit Sundi lebih rendah capaiannya dibanding dengan Kecamatan sepuluh Kecamatan Lainnya dengan Tingkat serapan tertinggi adalah pada Kecamatan Junjung Sirih.

C. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase tingkat penyerapan anggaran Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAK
 - b. Pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada kebutuhan (Anggaran realistis)
 - c. Rencana kerja telah memiliki tujuan, target dan time line yang jelas dan terukur
 - d. Integrasi penggunaan UT dalam percepatan serapan anggaran
 - e. Fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan
 - f. Kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - g. Disiplin dalam pelaporan keuangan
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterlambatan pengadaan barang/jasa karna barang yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu
 - b. Proses pengadaan dilakukan melalui e katalog Dimana aplikasi ini terjadi updating V5 ke V6
 - c. Belum optimalnya pemahaman penyedia tentang pengadaan barang melalui e-katalog
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Meningkatkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada RAK
 - c. Sosialisasi e katalog kepada penyedia
 - d. Perencanaan anggaran agar disusun lebih realistis dan sesuai kebutuhan
 - e. Melakukan koordinasi yang inetsif sesame pengelola keuangan terkait koordinasi pengelolaan keuangan

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Targ et	Realis asi	Capaia n		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase tingkat penyerapan anggaran	95%	75,63	76,84	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1.499.471.784	1.144.178.360	76,31%
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.552.850	61.101.340	63,95
				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.350.000	4.350.000	100%
Rata-rata Capaian			76,84	Total Anggaran	1.599.374.634	1.209.629.700	75,63
Tingkat efisiensi			= 1,21%				
Tingkat Efektivitas			= 101,60%				

Pada indikator Persentase tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan Bukit Sundi Tingkat efisiensinya sebesar 1,21 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 101,60 % dengan Pagu Anggaran Rp. 1.599.374.634,-. Dalam pencapaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- b. Optimalisasi SDM aparatur baik ASN maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan
- c. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.552.850	61.101.340	63.95%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.552.850	61.101.340	63.95%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.743.646	4.418.000	65.51%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.809.204	56.683.340	63.83%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.350.000	4.350.000	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.350.000	4.350.000	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.350.000	4.350.000	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.499.471.784	1.144.178.360	76,31%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.731.878	43.456.136	92.99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.731.878	43.456.136	92.99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.158.684.505	872.188.158	75.27%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.684.505	872.188.158	75.27%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,479,876	89,588,333	69.73%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,882,922	1,337,328	46.39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.133.296	9.986.030	45.12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.716.418	27.171.600	78,27%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.013.240	2.969.375	17.45%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.734.000	48.124.000	93.02%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.345.904	13.997.800	80.70%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.750	0,00	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.233.154	13.997.800	81.23%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.229.621	124.947.933	84.29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.766.136	100.512.791	83.92%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.463.485	24.435.142	85.85%

VI. Jumlah Inovasi Kecamatan

Inovasi Kecamatan adalah Upaya pembaharuan atau terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi administrasi dan kesejahteraan Masyarakat di wilayahan Kecamatan. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan Solusi kreatif dalam menghadapi tantangan local, pemanfaatan teknologi dan pelibatan Masyarakat. indikator yang digunakan seberapa banyak inovasi kecamatan yang dilakukan selama satu tahun.
Formulai pengukuran indikator nya adalah :

Jumlah Inovasi Kecamatan = Jumlah gagasan atau Solusi kreatif untuk meningkatkan pelayanan public, tata Kelola pemerintahan atau kesejahteraan Masyarakat.

Inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan adalah layanan buku tamu dan penilaian pelayanan kecamatan secara elektronik

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.11

Jumlah Inovasi Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Inovasi Kecamatan	1	1	100 %

Berdasarkan tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah inovasi kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 1 inovasi dan terealisasi 1 (satu) inovasi Dimana realisasi sesuai dengan target. Capaian kinerja nya adalah 100 %.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=7/ 11
1	Jumlah Inovasi Kecamatan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	100 %

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah Inovasi Kecamatan tahun ini mengalami **peningkatan**. jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini yang mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah 100 %

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Jumlah Inovasi Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah inovasi Kecamatan
1	Kubung	1
2	Bukit Sundi	1
3	Junjung Sirih	-
4	Payung Sekaki	-
5	X Koto Diatas	-
6	Lembang Jaya	-
7	X Koto Singkarak	-
8	Tigo Lurah	-
9	Lembah Gumanti	1
10	Pantai Cermin	-
11	Hiliran Gumanti	-
12	Danau Kembar	-
13	Gunung Talang	-
14	Sungai lasi	1

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat tergambar bahwa jumlah inovasi kecamatan dibanding dengan Kecamatan lainnya bahwa Kecamatan Kubung, Kecamatan BukitSundi, Kecamatan Lembah Gumanti dan Sungai Lasi sama memiliki inovasi pelayanan publik pada Tahun 2025 yang terealisasi sesuai target.

D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase tingkat penyerapan anggaran Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk meningkatkan pelayanan public melalui usulan inovasi
 - b. Dukungan sumber daya aparatur yang berpikir kreatif dan inovatif untuk efisiensi pelayanan
 - c. Tersedia dukungan sarana dan prasarana pendukung layanan
 - d. Adopsi teknologi digital dan informasi untuk mendukung layanan
 - e. Kebijakan yang fleksibel dan mendukung pengembangan inovasi layanan
 - f. Lingkungan kerja yang mendorong ide-ide kreatif dan memberikan ruang bagi aparatur untuk mencoba inovasi baru
2. Faktor Penghambat
 - a. Keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Masyarakat
 - b. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pemanfaatan IT
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
 - a. Integrasi layanan terpadu antara Pemerintah Nagari dan Kecamatan sehingga memudahkan Masyarakat mendapatkan layanan secara efisien dan efektif
 - b. Penyediaan sarana infrastruktur TIK di Nagari yang berkategori *blank spot* dan *blind spot*.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Jumlah Inovasi Kecamatan	1	1	100 %	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.233.154	13.997.800	81,23 %
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.233.154	13.997800	81,23%
Rata-rata Capaian			100 %	Total Anggaran :	17.233.154	13.997800	81,23 %
Tingkat efisiensi = 18,77 %							
Tingkat Efektivitas = 123,11							

Dalam pembuatan buku tamu secara elektronik tidak membutuhkan anggaran khusus sehingga dalam implementasinya yang dibutuhkan adalah jaringan internet sehingga dapat diakses oleh Masyarakat yang berurusan dan juga memberikan penilaian terhadap pelayanan public yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan.Dalam pencapaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
- 2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pelayanan kepada Masyarakat melalui layanan barcode untuk mengisi buku tamu dan evaluasi kepuasan layanan.



Pelayanan pengisian buku tamu dan penilaian pelayanan pemerintah Kecamatan



Adapun dukungan anggaran untuk mencapai indikator ini adalah program/kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.233.154	13.997800	81,23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.233.154	13.997800	81,23%

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bukit Sundi merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bukit Sundi sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bukit Sundi dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Kecamatan Bukit Sundi mempunyai dua sasaran dengan lima indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 101% atau kategori Sangat Memuaskan.
- Indikator 2 (Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan.
- Indikator 3 (Cakupan Penanggulangan Bencana) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan.
- Indikator 4 (Persentase Penyerapan Anggaran) dengan capaian kinerja 76,84% atau kategori Memuaskan.
- Indikator 5 (Jumlah Inovasi Kecamatan) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

1. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan.
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya serta masih rendahnya kapasitas perangkat nagari sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum terlaksana secara optimal.

Adapaun langkah- langkah untuk meminimalkan hambatan- hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat- diklat maupun pembinaa- pembinaan.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
3. Melakukan pembinaan administrasi Nagari secara berkala di sembilan Nagari se- Kecamatan Bukit Sundi.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi ASN Berakhlak sesuai arahan Menpan.

4.3 SARAN TINDAK LANJUT

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Bukit Sundi selama Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil (Outcome) manfaat (benefit) dan dampak (imfacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut ditahun 2025 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bukit Sundi Tahun 2025 ini disusun agar dapat bermamfaat bagi kita semua dan menjai bahan perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya kemajuan di masa yang akan datang.

Muaro paneh, Februari 2026
Camat Bukit Sundi



VICE FEBRIANELDI, S.STP, M.Si

NIP. 19870208 200602 1 001

